

BAB II

BERBAGAI TEKANAN TERHADAP REPUBLIK ISLAM IRAN

Pada bagian ini penulis akan menjelaskan tentang tekanan-tekanan yang diterima Republik Islam Iran dan hukuman embargo yang dijatuhkan dari beberapa aktor-aktor internasional. Sebelum terbentuknya revolusi yang menjatuhkan rezim Shah Pahlevi di Iran hubungan diplomasi Iran dan Amerika bisa dikatakan sangat baik beberapa kerjasama ekonomi di bidang minyak bumi telah disetujui antar kedua Negara, selain itu Amerika juga merupakan salah satu aktor yang mendukung pembentukan nuklir Iran namun hubungan kedua Negara tersebut berubah drastis setelah terjadi revolusi islam di Iran.

Revolusi Islam Iran tersebut berhasil menggeser Shah sebagai Pemimpin dan kemudian digantikan dengan Ayatollah Khomeini, kebijakan Khomeini yang anti westernisasi menjadi pemicu kemarahan Amerika Serikat dan kemudian menimbulkan kebencian

A. Tekanan Amerika Terhadap Iran

Amerika Serikat merupakan salah satu Negara yang mempunyai pengaruh besar dalam perpolitikan wilayah Timur Tengah. Beberapa Negara kawasan ini telah menjalin kerjasama dengan Amerika di beberapa bidang. Kesuksesan Amerika ini diperoleh tentu saja melalui proses diplomasi yang baik. Harmonisnya hubungan antar Negara ditentukan dari hubungan diplomasi keduanya, jika hubungan diplomasi keduanya baik

maka akan menghasilkan kerjasama bilateral dan kemudian menjadikan kedua Negara tersebut menjadi mitra dalam hubungan internasional. Diplomasi menurut Sir Ernest satow adalah aplikasi intelejen dan taktik untuk menjalankan hubungan resmi antara pemerintah yang berdaulat, yang kadangkala diperluas dengan negara-negara jajahannya.⁹ Sedangkan menurut Barston diplomasi adalah manajemen antar hubungan negara atau hubungan antar negara dengan aktor-aktor hubungan internasional lainnya.¹⁰

Pada awalnya hubungan Amerika Serikat dengan Iran berjalan harmonis tidak seperti sekarang, Amerika Serikat dan Iran pertama kali menjalin hubungan bilateralnya ketika Shah Iran, Nasseredin Shah Qajar, mengirim duta besar pertama Iran, Mirza Abolhasan Syirazi, ke Washington DC pada tahun 1856. Hubungan baik tersebut menghasilkan beberapa kerjasama antar kedua Negara. Seperti saat ditanda tangannya kerjasama Iran dan Amerika Serikat dalam membuat program pengembangan nuklir pada tahun 1950-an sebagai bagian dari program Atom untuk program perdamaian. Dari sinilah Iran mulai mengembangkan nuklirnya.¹¹

Hubungan bilateral kedua negara dapat dikatakan berjalan dengan baik hingga perang dunia II. Selama perang dunia kedua, dengan semakin kuatnya pengaruh Inggris dan Uni Soviet di beberapa kota pusat instalasi

⁹ Sir Ernest Satow, *A Guide To Diplomatic Practice* dalam Sukawarsini Djelantik, *Diplomasi antara teori dan Praktik*, Yogyakarta ; Graha Ilmu, 2008 Hal. 3-4

¹⁰ R.P Barston, *Modern Diplomacy*, dalam Sukawarsini Djelantik, *Diplomasi antara teori dan Praktik*, Yogyakarta ; Graha Ilmu, 2008 Hal. 4

¹¹ Hossein Abadian b(1377), *The Political Bioghrapy of Mozaffar Baghai* (in Persian), Teheran : Political Studies and Research Institute, h. 106

minyak Iran, akhirnya Shah Pahlevi mulai mendekati kembali Amerika Serikat yang pada saat itu dipandang oleh dunia Internasional sebagai salah satu negara kuat di dunia.

Kemudian kerjasama antar kedua Negara berlanjut dibidang militer, hal itu berawal ketika adanya kesadaran Muhammad Reza Shah Pahlevi tentang besarnya potensi yang dimiliki Iran saat itu, yaitu sumber daya alam yang melimpah dan letaknya yang strategis, kedua hal tersebut menjadikan Iran sebagai wilayah yang sering dijadikan rebutan berbagai Negara besar, seperti yang terjadi pada masa Perang Dunia I ketika sekutu dan poros melakukan pertempuran di Iran. Dari sejarah kelam itulah Muhammad Reza Shah Pahlevi berniat memperkuat Negeranya dengan melakukan modernisasi dibidang Militer, dengan penguatan militer ini ia berharap Iran terangkat sebagai polisi di kawasan Teluk. Namun modernisasi militer ini mengharuskan Reza Shah Pahlevi mengalokasikan sebagian besar anggaran Negara di khususkan untuk Militer.¹²

Untuk mewujudkan cita-citanya memodernisasi militer Iran, Muhammad Reza Shah Pahlevi harus melakukan kerjasama dengan Amerika dan Israel dibidang militer. Pada saat itu kekuatan Iran sangat tergantung dengan Amerika. Dari kerjasama tersebut Iran mampu memperbaharui peralatan militernya dengan membeli berbagai peralatan canggih, seperti yang disebut Nasir Tamarayang dikutip oleh Khairul Shaleh sebagai berikut.

¹² Faradillah widyarini. Latar Belakang Jatuhnya Muhammad Reza Pahlevi (1941-1979). h.34

Kemampuan Iran saat itu ialah Iran memiliki 800 Tank M 60 dan Tank M 47 buatan Amerika Serikat. 760 Chief-Thank, 250 Scorpion, 1500 Iranian Lion. Sementara peralatan udara Iran memiliki peralatan modern seperti : 57 pesawat pengangkut tempur C 130,, 250 pesawat pembom Phantom, 160 buah F 16, 80 buah F14, 200 buah F 4, dan 120 buah F 5. Adapun pesawat F4 mereka dilengkapi dengan peluru kendali Phoenix, selanjutnya angkatan laut mereka dipersenjatai dengan pesawat pengintai P 36, puluhan kapal patrol, 3 buah kapal selam, 4 buah Destroyer Spruance dan Hidroglisseur yang dapat mendarat di air sedangkal apapun.¹³

Kekuatan militer Iran ini sangat maju ini dirasakan manfaatnya ketika mampu membantu Iran dalam melawan invasi Iraq ketika terjadi perang Iraq-Iran. Dari kekuatan militer Iran ini, Muhammad Reza Shah Pahlevi berhasil mengukuhkan kedudukannya Iran sebagai Polisi dikawasan Teluk.

Bangkitnya rezim baru memperburuk hubungan Iran dan Amerika, kekhawatiran Amerika tentang ancaman terhadap aset-asetnya di Iran benar-benar terjadi, semua badan usaha milik Negara asing di Iran di nasionalisasikan tanpa terkecuali badan usaha milik Amerika. Hal ini menjadi puncak kemarahan Amerika terhadap Iran yang kemudian menghentikan dukungannya terhadap pengembangan nuklir Iran.

¹³ Chairul Shaleh. Peranan Imam Ayatollah Khomeini Dalam Revolusi Islam Iran 1977-1979. (Depok: Universitas Indonesia, 1966), 54.

Iran menghentikan program nuklirnya pada tahun 1979, namun kembali melanjutkan program ini di tahun 1982.¹⁴ Di tahun 1985, berdasarkan laporan National Intelligence Council menyatakan bahwa proliferasi Iran merupakan ancaman potensial, menyebutkan bahwa Teheran tertarik untuk mengembangkan fasilitas yang dapat sewaktu-waktu memproduksi material yang dapat digunakan untuk persenjataan. Walaupun demikian, laporan tersebut juga menyatakan bahwa akan butuh waktu yang sangat lama sampai hal ini dapat terlaksana.¹⁵ Di lain pihak, pemerintah Iran menyatakan bahwa program nuklir Iran ditujukan untuk menghasilkan sumber daya listrik, yang akan menggantikan konsumsi minyak dan gas. Iran sangat menentang penggunaan nuklir yang digunakan sebagai senjata dan telah berulang kali menyatakan bahwa program pengembangan nuklir Iran hanya ditujukan untuk tujuan damai.

Amerika Serikat terus mengambil langkah represif dan menggunakan sekutu-sekutu dekatnya dalam menekan Iran karena melihat pengembangan teknologi nuklir Iran terus mengalami kemajuan pesat. AS tidak dapat mengelakkan bahwa para ilmuwan-ilmuwan Iran telah berhasil menguasai teknologi nuklir yang menyebabkan Iran tidak sepenuhnya bergantung pada negara lain untuk mengembangkan teknologi nuklirnya. Dikhawatirkan teknologi nuklir Iran tersebut terus berkembang hingga berujung pada pengembangan senjata nuklir.

¹⁴ *Middle East-South Asia: Nuclear Handbook*, Central Intelligence Agency, May 1988. Dalam Paul K Kerr. *Iran's Nuclear Program: Status*. Diunduh dari <<http://www.fas.org/sgp/crs/nuke/RL34544.pdf>> pada 20 juni 2016.

¹⁵ Paul K Kerr. *Iran's Nuclear Program: Status*. Diunduh dari <<http://www.fas.org/sgp/crs/nuke/RL34544.pdf>> pada 20 juni 2016.

Berdasarkan dari pemikiran tersebut, Amerika menganggap pengembangan nuklir Iran harus dihentikan karena bisa berdampak negatif bagi stabilitas keamanan kawasan Timur Tengah. Strategi untuk menghentikan pengembangan nuklir Iran terus diterapkan oleh AS.

Mulai dari kebijakan luar negeri AS yang menentang dan mengancam akan menyerang Iran jika Iran tidak menghentikan pengembangan nuklirnya, hingga pelebaran sayap pengaruh AS dengan menguatkan barisan Sekutu-sekutunya di berbagai belahan kawasan untuk bersama-sama melakukan sikap menolak terhadap pengembangan teknologi nuklir Iran. Misalnya, di Eropa, AS mendorong sekutunya yakni Inggris, Perancis dan Jerman untuk melakukan negosiasi agar Iran mau menghentikan pengembangan nuklirnya dengan menukar teknologi nuklir dengan teknologi Light Water Reactor (LWR).¹⁶

Kemudian, menurut laporan mingguan BPPK Kemenlu RI (2010), di kawasan Asia, AS mendorong Jepang untuk tidak memberikan bantuan yang berhubungan dengan pensuplaian bahan-bahan pengembangan teknologi nuklir. Tidak hanya itu, Kazhim dan Hamzah (2007) menambahkan bahwa di kawasan Timur Tengah, AS berhasil mempengaruhi negara-negara pan Arabisme seperti Uni Emiratet Arab (UAE), Arab Saudi, Kuwait, Irak, dan Oman untuk melakukan penekanan terhadap Iran atas tuduhan pengembangan senjata nuklir.

¹⁶ Adel El-Gogary. Ahmadinejad The Nuclear Savior of Taheran; Sang Nuklir Membidas Hegemoni AS dan Zionis. Imam. 2006

Dalam usaha menghentikan pengembangan teknologi nuklir Iran, AS giat melakukan penggalangan dukungan ke negara-negara di berbagai belahan dunia. Tidak hanya itu, Amerika juga mencoba menghentikan nuklir Iran melalui IAEA selaku badan otoritas tertinggi yang berhak melakukan pemeriksaan terhadap suatu negara yang mengembangkan teknologi nuklir.

Selain itu Amerika juga menekan Iran dengan propaganda melalui media massa. Peran media massa dalam propaganda bisa dikatakan sangat efektif.¹⁷ Media secara signifikan berpengaruh terhadap dunia politik berfungsi sebagai saluran politisi dan negarawan untuk memperluas pengaruhnya. Bahkan dalam konteks Hubungan Internasional dapat dipersepsikan menjadi konteks propaganda dimana media massa dipahami sebagai alat yang potensial bagi kekuatan negara.¹⁸

Dunia penyiaran mengalami fenomena ‘*CNN Effects*’ pada tahun 1990an terkait Perang Teluk yang melibatkan pembuat kebijakan, aktor politik global hingga media besar yang melibatkan beberapa negara besar. Sehingga media tersebut diberi label media global.¹⁹ Dalam setiap pemberitaan CNN seringkali menuliskan *senior official* bagi narasumber yang memberi pernyataan tentang Iran.²⁰

¹⁷ Nurudin. *Komunikasi Propaganda*. Remaja Rosdakarya. Bandung. (2002). Hal. 35.

¹⁸ Brian White, Richard Little & Michael Smith. *Issues in World Politics*. Palgrave. New York. (2001). Hal. 214.

¹⁹ *Ibid.* Hal. 222

²⁰ Tom Burghardt. Empires Don't Apologise. Hal. 28. *Target Iran, Lies. Propaganda. Provocation*. ColdType. Januari 2012. <http://www.coldtype.net/Assets.12/PDFs/0112.ColdType.pdf>. Diakses pada 19 April 2016.

Propaganda yang dilakukan media AS terhadap Iran dengan pemberitaan yang bersifat tendensius. Pemberitaan yang memberi stigma negatif terhadap Iran. Headline mengenai pemberitaan Iran terkesan provokatif. Salah satu contohnya berita media cetak bertajuk “Iran, perceiving threat from West, willing to attack on U.S. soil, U.S. intelligence report finds” pada harian The Washington Post tanggal 31 Januari 2012. Dalam pemberitaan tersebut dijelaskan, ambisi Iran dalam pengembangan nuklir merupakan hal yang membahayakan.²¹

Selain itu contoh lainnya, pada media elektronik maupun online yang dimiliki CNN, pemberitaan terhadap Iran seringkali tidak berimbang. Konteks pemberitaan yang diangkat berupaya membangun opini publik negatif mengenai Iran. Dalam pemberitaan CNN tanggal 21 February 2012 yang bertajuk “Iran Threatens Preemptive Action” menempatkan Iran sebagai negara yang agresif yang akan menggunakan serangan yang mengancam kepentingan nasionalnya.²²

Kemudian pada tanggal 4 Juli 2012 dengan tajuk berita Televisi CNN “Iran threatens Missile Strike On US bases in Middle East” memberitakan Iran berupaya meluncurkan pelurunya kepada target yang tepat yaitu kepada Israel dan pangkalan Amerika Serikat.²³ Hal tersebut berdasarkan

²¹ http://www.washingtonpost.com/world/national-security/iran-is-prepared-to-launch-terrorist-attacks-in-us-intelligence-report-finds/2012/01/30/gIQACwGweQ_story.html. Diakses pada 27 Juli 2016.

²² <http://news.blogs.cnn.com/2012/02/21/iran-threatens-preemptive-action/> Diakses pada 27 Juli 2016.

²³ <http://www.youtube.com/watch?v=W3f4qrqagn>. Diakses pada 27 Juli 2016.

pernyataan pejabat Iran, namun hanya berupa tulisan tanpa ada pernyataan lisan yang disampaikan oleh pihak berwenang.

Upaya Amerika dalam menekan Iran ialah menggunakan sekutu-sekutunya yang mempunyai hubungan kerjasama dengan Iran untuk berhenti melakukan kerjasama dengan Iran atau ikut menekan Iran seperti yang dilakukan oleh Uni Eropa, selain itu dengan bantuan media massa, Amerika terus menerus membentuk opini publik bahwa Iran merupakan Negara yang berbahaya.

B. Tekanan PBB dan Uni Eropa Terhadap Iran

Sebelum mendapatkan embargo dari pihak Uni Eropa, Iran pernah bekerja sama dengan Uni Eropa pada Tahun 1979-2011 dalam perdagangan minyak yang dimana Uni Eropa mengimpor minyak dari Iran seperti Yunani, Spanyol, dan Italia. Dimana Iran mengeksport minyak ke negara Yunani sebesar 14%, Spanyol 14,6%, dan Italia sebesar 13,1%. Namun karena upaya Amerika dalam menekan Iran soal perkara pengembangan nuklir Iran yang akhirnya mengikut sertakan Uni Eropa dalam penjatuhan sanksi terhadap Iran, selain Uni Eropa dan Amerika, PBB juga ikut menekan Iran alasan pemberian sanksi juga sama yaitu adanya dugaan bahwa Iran sedang mengembangkan senjata pemusnah massal yang berdampak negatif bagi ke stabilitas keamanan dunia khususnya dikawasan Timur-Tengah.

Dasar bagi program nuklir Iran diletakkan pada 5 Maret 1957, ketika sebuah “perjanjian yang diusulkan untuk kerjasama dalam penelitian dalam

penggunaan damai energi atom” diumumkan di bawah naungan program *Atoms for Peace*²⁴ nya Eisenhower.

Pada tahun 1967, didirikan *Teheran Nuclear Research Center* (TNRC), TNRC dilengkapi dengan 5 Mega Watt reaktor riset nuklir yang disediakan oleh AS, yang diberi bahan bakar uranium.²⁵

Iran menandatangani *Nuclear Non-Proliferation Treaty* (NPT)²⁶ pada tahun 1968 dan meratifikasinya pada tahun 1970, membuat program nuklir Iran diverifikasi IAEA (*International Atomic Energy Agency*).

Pada April 1984, intelijen Jerman Barat melaporkan bahwa Iran mungkin memiliki bom nuklir dalam waktu dua tahun dengan uranium dari Pakistan. Jerman membocorkan berita ini dalam laporan pertama publik intelijen Barat dari program senjata nuklir pasca-revolusi di Iran.²⁷ Kemudian, minoritas penggerak (*Minority Whip*) dari Senat Amerika Serikat, Alan Cranston menegaskan bahwa tujuh tahun lagi Republik Islam Iran akan mampu membangun senjata nuklirnya sendiri.

IAEA segera mencari akses ke fasilitas tersebut dan informasi lebih lanjut dan kerjasama dari Iran mengenai program nuklirnya. Menurut perjanjian yang berlaku pada saat pelaksanaan kesepakatan perlindungan Iran dengan IAEA, Iran tidak diperlukan untuk memungkinkan inspeksi IAEA terhadap fasilitas nuklir baru sampai enam bulan sebelum bahan

²⁴ <<http://www.cfr.org/iran/irans-nuclear-program/p16811>>, diakses 28 Desember 2013, pukul 10.20 WIB

²⁵ <<http://www.nnsa.doe.gov/na-20/frsnf.shtml>>, diakses 28 Desember 2013, pukul 11.00 WIB

²⁶ Perjanjian ini memiliki tiga pokok utama, yaitu nonproliferasi, perlucutan, dan hak untuk menggunakan teknologi nuklir untuk kepentingan damai.

²⁷ Anthony H. Cordesman, 2000, “Iran and Nuclear Weapons: A Working Draft”, Center for Strategic and International Studies

nuklir diperkenalkan ke fasilitas itu. Pada saat itu, Iran bahkan tidak diperlukan untuk menginformasikan adanya fasilitas IAEA.²⁸

Perancis, Jerman dan Inggris melakukan inisiatif diplomatik dengan Iran untuk menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan tentang program nuklirnya. Pada 21 Oktober 2003, di Teheran, pemerintah Iran dan Menteri Luar Negeri dari 3 negara Uni Eropa tersebut (EU-3) mengeluarkan pernyataan yang dikenal sebagai *Deklarasi Teheran* di mana Iran setuju untuk bekerja sama dengan IAEA.²⁹ Sebagai hasilnya, Uni Eropa-3 (EU-3) secara eksplisit setuju untuk mengakui hak-hak nuklir Iran dan membahas cara-cara Iran agar bisa memberikan “jaminan yang memuaskan” tentang program tenaga nuklirnya, setelahnya Iran akan mendapatkan akses teknologi modern lebih mudah. Iran menandatangani Protokol Tambahan (*Additional Protocol*) pada 18 Desember 2003, dan setuju untuk bertindak sebagaimana protokol yang berlaku dimana Iran bersedia menyerahkan data nuklirnya untuk pembuatan laporan yang dibutuhkan untuk IAEA dan mengizinkan IAEA akses yang diperlukan oleh inspektur IAEA.

Terkait dugaan banyak pihak tentang Iran memiliki program senjata nuklir tersembunyi, IAEA melaporkan hasilnya pada bulan November 2003 menyatakan bahwa “tidak ada bukti”, tetapi juga itu tidak dapat menyimpulkan bahwa program nuklir Iran ini secara eksklusif damai.

Menurut ketentuan Perjanjian Paris, pada tanggal 14 November 2004, kepala perunding nuklir Iran mengumumkan suspensi sukarela dan

²⁸ <<http://www.iaea.org/Publications/Documents/Board/2003/gov2003-40.pdf>>, diakses 28 Desember 2013, pukul 10.38 WIB

²⁹ “News Center: In Focus: IAEA and Iran”

<http://www.iaea.org/NewsCenter/Focus/laeaIran/statement_iran21102003.shtml>, diakses 28 Desember 2013, pukul 10.34 WIB

sementara dari program pengkayaan uraniumnya (*uranium enrichment program*) (pengkayaan bukanlah pelanggaran terhadap NPT) dan pelaksanaan sukarela dari protokol tambahan, setelah tekanan dari Inggris, Perancis, dan Jerman yang bertindak atas nama “Uni Eropa” (dalam konteks ini: EU-3). Langkah ini dikatakan pada saat menjadi sukarelawan, langkah pembangunan-kepercayaan, untuk melanjutkan untuk beberapa jangka waktu yang wajar (enam bulan yang disebutkan sebagai referensi) sebagai kelanjutan negosiasi dengan EU-3. Pada 24 November, Iran berusaha untuk mengubah ketentuan-ketentuan perjanjian dengan Uni Eropa untuk mengecualikan beberapa peralatan dari kesepakatan ini untuk pekerjaan penelitian. Permintaan ini dijatuhkan empat hari kemudian. Menurut Seyyed Hossein Mousavian, salah satu wakil Iran untuk negosiasi Perjanjian Paris, Iran menegaskan kepada rekan-rekan Eropa mereka bahwa Iran tidak akan mempertimbangkan akhir permanen untuk pengkayaan uranium (*uranium enrichment*): Sebelum teks Perjanjian Paris ditandatangani, Dr Rohani menekankan bahwa mereka harus berkomitmen untuk tidak berbicara atau bahkan berpikir tentang kasasi lagi. Para duta besar menyampaikan pesannya kepada menteri luar negeri mereka sebelum penandatanganan teks Paris disetujui. Iran menegaskan kepada rekan-rekan Eropa mereka bahwa jika yang terakhir dicari penghentian lengkap kegiatan siklus bahan bakar nuklir Iran, tidak akan ada negosiasi. Negara-negara Eropa menjawab bahwa mereka tidak mencari penghentian tersebut, hanya pada jaminan program nuklir Iran tidak dilalihkan untuk tujuan militer.³⁰

³⁰ Seyyed Hossein Mousavian, “Iran and the West: The Path to Nuclear Deadlock”. (*Global*

Pada bulan Februari 2005, Iran menekan EU-3 untuk mempercepat pembicaraan, yang mana EU-3 menolak untuk melakukannya. Pembicaraan membuat sedikit kemajuan karena kedua belah pihak dari posisi yang berbeda. Di bawah tekanan dari AS, negosiator Eropa tidak bisa setuju untuk mengizinkan pengayaan di tanah Iran. Meskipun Iran menyajikan tawaran, termasuk pembatasan sukarela pada volume pengkayaan dan output, itu ditolak. EU-3 menghentikan komitmen yang telah mereka buat untuk mengakui hak Iran di bawah NPT untuk penggunaan damai energi nuklir.

Pada awal Agustus 2005, setelah pemilihan Mahmoud Ahmadinejad sebagai Presiden Iran pada bulan Juni, Iran menghapus segel pada peralatan pengkayaan uraniumnya di Isfahan, yang oleh para pejabat Inggris disebut sebagai “pelanggaran Perjanjian Paris” padahal sebelumnya juga Uni Eropa melanggar ketentuan *Paris Agreement* dengan menuntut agar Iran menghentikan pengkayaan nuklir. Beberapa hari kemudian, EU-3 menawarkan Iran paket dengan imbalan penghentian pengkayaan secara permanen. Kabarnya, itu termasuk manfaat dalam bidang politik, perdagangan dan nuklir, serta pasokan bahan nuklir jangka panjang dan jaminan non-agresi dengan Uni Eropa. Mohammad Saeedi, wakil kepala organisasi energi atom Iran menolak tawaran itu, ia menyebutnya “sangat menghina dan memalukan” dan analisis independen lain mencirikan tawaran Uni Eropa itu sebagai “kotak kosong”. Pengumuman Iran bahwa pihaknya akan melanjutkan pengkayaan beberapa bulan setelah pemilihan Presiden

Dialogue, 2006). Ditampilkan pada situs *Commonwealth Institute (file .pdf)*, <<http://www.comw.org/pda/fulltext/06mousavian.pdf>>, diakses 28 Desember 2013, pukul 10.49 WIB

Iran Ahmadinejad. Keterlambatan dalam memulai lagi program ini adalah untuk memungkinkan IAEA menginstal ulang peralatan pemantauan. Sebenarnya, dimulai kembalinya program ini bertepatan dengan pemilihan Presiden Mahmoud Ahmedinejad, dan penunjukan Ali Larijani sebagai kepala negosiator nuklir Iran.³¹

Sekitar tahun 2005, Jerman menolak mengekspor peralatan nuklir lagi atau pengembalian uang yang dibayarkan oleh Iran untuk peralatan seperti pada tahun 1980-an.

Pada bulan Agustus 2005, dengan bantuan dari Pakistan, sekelompok ahli dari pemerintahan AS dan ilmuwan internasional menyimpulkan bahwa jejak bom uranium ditemukan di Iran yang berasal dari peralatan Pakistan yang terkontaminasi dan tidak membuktikan program senjata nuklir rahasia di Iran. Pada bulan September 2005, Direktur Jenderal IAEA Mohammad ElBaradei melaporkan bahwa “sebagian besar” HEU yang ditemukan di Iran oleh inspektur agensi berasal dari komponen mesin pemisah (*centrifuge*) impor, memvalidasi klaim Iran bahwa jejak itu karena kontaminasi. Sumber di Wina dan Departemen Luar Negeri melaporkan bahwa, untuk semua tujuan praktis, masalah HEU telah diatasi.

Dalam pidatonya di PBB pada 17 September 2005, Presiden Mahmoud Ahmadinejad menyatakan bahwa pengkayaan Iran mungkin akan dikelola oleh sebuah konsorsium internasional, dengan Iran berbagi kepemilikan

³¹ BBC News, 2005, “Middle East | Iran restarts nuclear programme”.
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/4131706.stm>, diakses 28 Desember 2013, pukul 11.03 WIB

dengan negara-negara lain. Tawaran itu ditolak mentah-mentah oleh Uni Eropa dan Amerika Serikat.³²

Dewan Gubernur IAEA menangguhkan sebuah keputusan resmi atas kasus nuklir Iran selama dua tahun setelah tahun 2003, sementara Iran melanjutkan kerjasama dengan EU-3. Pada 24 September 2005, setelah Iran meninggalkan *Perjanjian Paris*, Dewan menemukan bahwa Iran telah tidak sesuai dengan perjanjian perlindungannya, sebagian besar didasarkan pada fakta-fakta yang telah dilaporkan pada awal November 2003.³³

Pada 4 Februari 2006, 35 anggota Dewan Gubernur IAEA memilih 27-3 (dengan lima abstensi: Aljazair, Belarus, Indonesia, Libya dan Afrika Selatan) untuk melaporkan Iran ke Dewan Keamanan PBB. Langkah ini disponsori oleh Inggris, Perancis dan Jerman, dan itu didukung oleh Amerika Serikat. Dua anggota dewan permanen, Rusia dan Cina, setuju untuk menyerahkan dengan syarat bahwa dewan tidak mengambil tindakan sebelum bulan Maret. Tiga anggota yang memilih menentang rujukan adalah Venezuela, Suriah dan Kuba. Sebagai tanggapan, pada 6 Februari 2006, Iran menangguhkan pelaksanaan sukarela dari Protokol Tambahan dan semua kerjasama sukarela dan keterikatan kerjasama non-hukum lainnya dengan IAEA melampaui apa yang diperlukan oleh perjanjian pengamanan.

³² *The Daily Telegraph*, 2013, "Iran: how the West missed a chance to make peace with Tehran", London, <<http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iran/10007603/Iran-how-the-West-missed-a-chance-to-make-peace-with-Tehran.html>>, diakses 28 Desember 2013, pukul 11.12 WIB

³³ IAEA, 2005, *Implementation of the NPT Safeguards Agreement in the Islamic Republic of Iran* (PDF), <<http://www.iaea.org/Publications/Documents/Board/2005/gov2005-77.pdf>> diakses 28 Desember 2013, pukul 11.15 WIB

Pada akhir Februari 2006, Direktur IAEA Mohammad El Baradei mengangkat saran dari kesepakatan, di mana Iran akan menyerahkan pengkayaan (*enrichment*) skala industri dan bukan membatasi programnya untuk fasilitas percontohan skala kecil, dan setuju untuk mengimpor bahan bakar nuklir dari Rusia. Iran menunjukkan bahwa sementara mereka pada prinsipnya tidak akan bersedia untuk menyerahkan hak mereka untuk pengkayaan (*enrichment*), mereka bersedia untuk mempertimbangkan solusi kompromi. Namun, pada Maret 2006, pemerintahan Bush membuatnya jelas bahwa mereka tidak akan menerima pengkayaan (*enrichment*) sama sekali di Iran.

Dewan Gubernur IAEA menanggapi laporan resmi ketidak patuhan Iran ke Dewan Keamanan PBB (seperti laporan yang diwajibkan oleh Pasal XII.C Undang-Undang IAEA), sampai dengan 27 Februari 2006. Dewan biasanya membuat keputusan dengan konsensus, namun dalam keputusan non-konsensus langka itu mengadopsi resolusi ini melalui pemungutan suara, dengan 12 abstensi.

Pada 11 April 2006, Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad mengumumkan bahwa Iran telah berhasil memperkaya (*enriched*) uranium. Presiden Ahmadinejad membuat pengumuman dalam pidato televisi dari kota timur laut Mashhad, di mana ia mengatakan “Saya secara resmi mengumumkan bahwa Iran bergabung dengan kelompok negara-negara yang memiliki teknologi nuklir.” Uranium itu diperkaya hingga 3,5% menggunakan lebih dari seratus mesin pemisah (*centrifuge*).

Pada 13 April 2006, setelah Menteri Luar Negeri AS Condoleezza Rice berkata (pada 12 April 2006) pada Dewan Keamanan harus mempertimbangkan “langkah-langkah yang kuat” untuk mendorong Teheran untuk mengubah arah dalam ambisi nuklirnya, Presiden Ahmadinejad bersumpah bahwa Iran tidak akan mundur dari pengkayaan uranium dan dunia harus memperlakukan Iran sebagai kekuatan nuklir, ia mengatakan “jawaban kami kepada mereka yang marah tentang Iran yang mencapai secara penuh siklus bahan bakar nuklir hanyalah salah satu frase. Kami berkata: Marahlah kepada kami dan matilah dari kemarahan ini,” karena “Kami tidak akan mengadakan pembicaraan dengan siapa pun tentang hak bangsa Iran untuk memperkaya (*enrich*) uranium.”

Pada 14 April 2006, Institut Sains dan Keamanan Internasional (ISIS atau *Institute for Science and International Security*) menerbitkan serangkaian gambar satelit teranalisis mengenai fasilitas nuklir Iran di Natanz dan Esfahan.³⁴ Ditampilkan dalam gambar-gambar ini adalah pintu masuk terowongan baru di dekat Fasilitas Konversi Uranium (UCF atau *Uranium Conversion Facility*) di Esfahan dan konstruksi dilanjutkan di situs pengkayaan (*enrichment*) uranium Natanz. Selain itu, serangkaian gambar tertanggal kembali ke tahun 2002 menunjukkan bahwa bangunan pengkayaan (*enrichment*) bawah tanah dan itu selanjutnya ditutupi oleh tanah, beton, dan meterial lainnya. Kedua fasilitas itu telah tunduk pada inspeksi dan perlindungan IAEA.

³⁴ Paul Brannan, 2006, “ISIS Imagery Brief: New Activities at the Esfahan and Natanz Nuclear Sites in Iran” (PDF). *Institute for Science and International Security* (ISIS), <<http://www.isis-online.org/publications/iran/newactivities.pdf>>, diakses 28 Desember 2013, pukul 11.16 WIB

Iran menanggapi tuntutan untuk menghentikan pengkayaan (*enrichment*) uranium 24 Agustus 2006, menawarkan untuk kembali ke meja perundingan, tetapi menolak untuk mengakhiri pengkayaan (*enrichment*).

Qolam Ali Hadad-adel, ketua parlemen Iran, mengatakan pada tanggal 30 Agustus 2006 bahwa Iran memiliki hak untuk “aplikasi teknologi nuklir yang damai dan semua pejabat lain setuju dengan keputusan ini,” menurut semi-resmi Badan Berita Pelajar Iran (*Iranian Students News Agency*). “Iran membuka pintu negosiasi untuk Eropa dan berharap bahwa jawaban yang diberikan kepada paket nuklir yang akan membawa mereka ke meja.”

Dalam *Resolusi 1696*³⁵ tanggal 31 Juli 2006, Dewan Keamanan PBB menuntut agar Iran menghentikan semua kegiatan terkait pengkayaan (*enrichment*) dan pemrosesan kembali (*reprocessing*). Namun hal tersebut tidak diindahkan Iran

Dalam *Resolusi 1737*³⁶ Dewan Keamanan PBB tanggal 26 Desember 2006, Dewan memberlakukan serangkaian sanksi terhadap Iran untuk ketidak patuhan dengan resolusi Dewan Keamanan sebelumnya yang memutuskan bahwa Iran menghentikan kegiatan terkait pengkayaan (*enrichment*) tanpa penundaan. Sanksi tersebut terutama ditujukan terhadap transfer teknologi nuklir dan rudal balistik, dan sebagai tanggapan atas

³⁵ *Resolusi 1696*: menuntut agar Iran menghentikan kegiatan pengkayaan (*enrichment*) uraniumnya. (Dewan Keamanan PBB, *Resolusi 1696 S-RES-1696*, 2006) <http://www.undemocracy.com/S-RES-1696%282006%29/page_2/rect_184,543_829,610>, diakses 28 Desember 2013, pukul 11.20 WIB

³⁶ *Resolusi 1737*: menjatuhkan sanksi setelah Iran menolak menghentikan kegiatan pengkayaan, diperlukan Iran untuk bekerja sama dengan IAEA. (Dewan Keamanan PBB, *Resolusi 1737 S-RES-1737*, 2006) <<http://www.undemocracy.com/S-RES-1737%282006%29>>, diakses 28 Desember 2013, pukul 11.21 WIB

keprihatinan dari Cina dan Rusia, yang lebih ringan dari yang dicari oleh Amerika Serikat. Resolusi ini menyusul laporan dari IAEA bahwa Iran telah mengizinkan inspeksi berdasarkan perjanjian perlindungan, tetapi bukan menghentikan aktivitas terkait pengkayaan (*enrichment*).

Pada tahun 2010 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa kembali mempersulit keadaan Republik Islam Iran tersebut dengan mengesahkan Resolusi 1929 berisi sanksi tambahan bagi Iran menyangkut program pengembangan nuklir negara pimpinan Presiden Hassan Rouhani itu. Sanksi yang diberikan PBB kepada Iran antara lain sanksi nuklir dimana Iran tidak boleh mengembangkan senjata nuklir, sanksi migas dimana Iran tidak boleh mengirimkan minyak mentah dipasar internasional, larangan ekspor senjata yang di khawatirkan dapat mengembangkan ilmu atomic, sanksi pada bidang perbankan dimana Iran tidak boleh meminjam dana, sanksi untuk melakukan kegiatan diluar negeri yang sensitive seperti penampangan, produksi atau penggunaan bahan-bahan berteknologi uranium dan yang terakhir sanksi finansial yang dikenakan kepada beberapa orang Iran yang mana hal tersebut merupakan larangan bepergian keluar negeri seperti sanksi terhadap Javad Rahiqi, kepala pusat teknologi nuklir Iran.

Selain PBB, Uni Eropa juga menjatuhkan sanksi embargo terhadap Iran, secara resmi UE menjatuhkan sanksi ekonomi berupa embargo minyak terhadap Irani bulan Januari 2012, sanksi tersebut akan berlaku efektif 1 Juli 2012 mendatang. UE juga membekukan aset-aset yang dimiliki oleh Bank Sentral Iran, melarang perdagangan logam mulia emas, berlian dan barang

berharga milik badan publik Iran di Eropa. Kebijakan ini diambil UE karena keengganan Iran bernegosiasi serta kekhawatiran Israel dan AS akan melakukan aksi militer terhadap Iran bila tekanan ekonomi gagal. Sanksi ekonomi itu melengkapi sanksi ekonomi berupa larangan kerja sama dengan bank, asuransi dan PMA dalam sektor gas dan minyak bumi Iran, yang telah ditetapkan PBB kepada Iran.

AS yang selalu menjadi pelopor sanksi ekonomi terhadap Iran, kembali menjatuhkan sanksi ekonomi dengan membekukan semua transaksi keuangan yang terindikasi berkaitan dengan bank sentral Iran dan memblokir semua aset pemerintah Iran di AS. Sedangkan embargo minyak mempersempit ruang gerak perekonomian Iran. Tujuan dari sanksi itu sederhana saja: untuk menaikkan biaya dari semua kegiatan jual-beli yang terkait dengan minyak Iran hingga menimbulkan kesulitan sedemikian rupa bagi para mitra dagangnya dalam berbisnis dengan Iran. Kesulitan melakukan transaksi keuangan akan menyebabkan Iran ditinggalkan oleh semua mitra dagangnya, perekonomian Iran akan melemah dan memaksa negara itu kembali ke meja perundingan.